

ANALISIS PEMBIAYAAN PENDIDIKAN SMA DI KOTA SEMARANG

Oleh: Isti Hidayah¹⁾, Etty Susilowati²⁾, dan Sukirman³⁾

¹⁾Dosen Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang
e-mail: isti.hidayah@yahoo.com

²⁾Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang
e-mail: ettysoesilowati@yahoo.com

³⁾Dosen Prodi Akuntansi Universitas Negeri Semarang
e-mail: sukirman3002@yahoo.com

Abstract

The availability of fund budgeting will determine the sustainability of all components which run planning, implementation, controlling, evaluation, and development of education in Semarang city. This study aims: (1) to know the stakeholders' perception about the fulfillment of education budgeting standard of the senior high school education unit in Semarang city, (2) to know the stakeholders' perception about the fulfillment of curriculum implementation standard, educators and educational staffs standard, equipment standard, and organization of education implementation standard, and (3) to determine the education budget unit for each student of senior high school in Semarang city so that the learning can run appropriately and sustainably. This study is a descriptive research with population of 16 senior high schools in Semarang city. The sample was its population itself. The result suggests that the fulfillment of the national standard of education is good with score is more than 4 (maximum score is 5). However, the budgeting standard and the educators and education staffs standard should be concerned well in order to optimize the quality of education. By using interval of 95%, the education budget for each student is located in the interval of IDR 2,148,753.00 to IDR 3,184,025.00 per year and IDR 179,063.00 to IDR 265,335.00 per month. The government should increase the grant for school operation (BOS) which is now only fulfilling 77.3% of the minimum education operation and 19.1% of the minimum operational and personal budget of the research result.

Keywords: education budget unit for each student, senior high school in Semarang city

Abstrak

Ketersediaan anggaran dana akan menentukan keberlangsungan semua komponen terjadinya perencanaan, pelaksanaan, kontrol, evaluasi, dan pengembangan pendidikan di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan antara lain untuk: (1) mengetahui persepsi stakeholder terhadap pemenuhan standar pembiayaan pendidikan, (2) persepsi stakeholder terhadap pemenuhan standar implementasi kurikulum, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, dan standar pengelolaan pelaksanaan pendidikan satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Semarang, dan (3) menentukan satuan biaya pendidikan persiswa SMA di Kota Semarang agar pembelajaran dapat terlaksana secara teratur dan berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan sampel adalah populasi, yaitu 16 SMA negeri di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sudah baik dengan skor rata-rata di atas 4 (skor maksimal 5), namun dalam rangka mengoptimalkan mutu pendidikan, perlu diperhatikan standar pembiayaan dan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Dengan interval keyakinan 95% biaya pendidikan siswa berada dalam interval

Rp2.148.753,- hingga Rp3.184.025,- pertahun dan Rp179.063,- hingga Rp265.335,- perbulan. Perlu ditingkatkan besaran dana Biaya Operasional siswa (BOS), yang baru memenuhi biaya operasional pendidikan 77,3% dari batas terendah biaya operasional dan 19,10% dari batas terendah biaya operasional dan personal hasil penelitian.

Kata kunci: satuan biaya pendidikan tiap siswa, SMA Kota Semarang

Pendahuluan

Upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia terus dilakukan dalam berbagai aspek faktor penentu. Reformasi pendidikan mengacu pada 8 standar, yaitu (1) standar kompetensi lulusan, (2) standar isi, (3) standar proses (pembelajaran), (4) standar penilaian, (5) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (6) standar sarana-prasarana, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar pengelolaan. Implementasi Kurikulum 2013 memberikan konsekuensi reformasi pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi, pembayaran tunjangan sertifikasi, serta uji kompetensi dan pengukuran kinerja merupakan implikasi standar pendidik dan tenaga kependidikan. Rehabilitasi gedung sekolah, penyediaan laboratorium, perpustakaan beserta referensinya merupakan implikasi standar sarana-prasarana. Biaya operasional sekolah yang dikenal dengan sebutan BOS, bantuan siswa miskin, dan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)/Bidik Misi di perguruan tinggi merupakan implikasi standar pembiayaan. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan implikasi standar pengelolaan.

Menurut Nurteti (2008) keterkaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan' formulasi penentuan kebutuhan pembiayaan dalam pendidikan menjadi faktor yang sangat esensial. Sedangkan Fattah (2007) telah merumuskan kebutuhan dan pembiayaan pendidikan dengan

menggunakan mekanisme *bottom up*, yaitu mekanisme yang disusun dari tingkat terendah penyelenggara pendidikan (satuan pendidikan) menuju ke pusat (Departemen Pendidikan Nasional).

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013, perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal I menjelaskan beberapa hal, antara lain bahwa (1) Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Standar Pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. (3) Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai Standar Nasional Pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. (4) Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. (5) Standar

Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. (6) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. (7) Standar Pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Fattah (2008) menjelaskan bahwa biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa seperti pembelian alat-alat pembelajaran, penyediaan sarana pembelajaran, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar, contohnya, uang jajan siswa, pembelian peralatan sekolah (pulpen, tas, buku tulis, dll).

PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menjelaskan standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan

berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi: tentang (1) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, (2) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan (3) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Standar Pembiayaan Pendidikan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

Penentuan Satuan Pembiayaan Pendidikan

Biaya satuan persiswa adalah biaya rata-rata persiswa yang dihitung dari total pengeluaran sekolah dibagi seluruh siswa yang ada di sekolah dalam kurunwaktu tertentu. Perhitungan satuan biaya pendidikan dapat menggunakan formula sebagai berikut: $S_b(s,t) = f [K(s,t) : M(s,t)]$, dimana S_b : satuan biaya murid per tahun; K : jumlah seluruh pengeluaran; M : jumlah murid; dan s : sekolah tertentu, t : tahun tertentu.

Bastian (2007) memaparkan bahwa komponen anggaran terdiri dari berbagai aktivitas yang terjadi dalam proses belajar mengajar. Dari berbagai aktivitas tersebut, biaya pelaksanaannya terdiri dari dua komponen, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung.

Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan dilakukan guna mewujudkan

pelaksanaan pendidikan yang bermutu. Dari delapan komponen standar nasional pendidikan, lima standar terlibat langsung dalam pelaksanaan pembelajaran bermutu, 3 standar yang lainnya sebagai pendukung pelaksanaan pembelajaran bermutu. Standar Pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Oleh karena itu, standar pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen penting untuk pemenuhan terlaksananya pendidikan bermutu. Pemerintah daerah (Kota Semarang) yang turut bertanggungjawab terhadap pendanaan pendidikan di Kota Semarang, perencanaan penganggaran yang tepat sesuai kebutuhan (besaran dan peruntukan) merupakan bagian manajemen sebuah organisasi. Perencanaan yang baik harus didasarkan pada data yang ada, berdasar data capaian tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan pada uraian di atas, karena satuan biaya pendidikan persiswa merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan sekolah (sumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua, dan masyarakat) secara efektif untuk kepentingan siswa dalam menempuh pendidikan, maka sekolah harus mengetahui besaran untuk keperluan penganggaran yang setidaknya mendekati ketepatan.

Pemenuhan delapan standar SNP (Standar Nasional Pendidikan), satu dengan yang lainnya saling terkait. Mengingat hal tersebut, maka penelitian ini selain berfokus pada kajian pembiayaan pendidikan, juga menyertakan kajian standar pendidikan yang lain. Inti pelaksanaan pendidikan adalah proses pembelajaran. Seorang guru yang harus merancang pelaksanaan pembelajaran sebelum melaksanakan pembelajaran, maka rancangan pembelajaran harus memperhatikan standar proses dan tidak akan

meninggalkan standar kelulusan, standar isi, dan standar penilaian. Dengan keterbatasan yang ada, maka dalam penelitian ini, SNP yang turut dikaji selain pembiayaan adalah standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, dan standar pengelolaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sebagai penelitian deskriptif dengan sampel adalah populasi, yaitu SMA negeri yang ada di Kota Semarang. Variabel penelitian adalah penganggaran pendidikan satuan pendidikan dan persepsi *stakeholder* terhadap pemenuhan standar nasional pendidikan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik *Delphi* (Widjaja, 2004; Jakaria, 2009), angket, dengan triangulasi dokumen dan website Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk data penganggaran. Analisis data dilakukan secara diskriptif naratif dan analisis statistik non parametrik untuk uji beda persepsi *stakeholder*, dan analisis penaksiran parameter (μ) untuk penganggaran dengan rumus $\bar{x} - z_{\frac{1}{2}\gamma} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + z_{\frac{1}{2}\gamma} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ (Sudjana, 2005:202), dimana γ : koefisien kepercayaan dan $z_{\frac{1}{2}\gamma} =$ bilangan z didapat dari tabel normal baku untuk peluang $\frac{1}{2} \gamma$. Analisis dilakukan dengan program SPSS.

Hasil dan Pembahasan

Penganggaran Biaya Pendidikan Satuan Pendidikan dan Satuan Biaya Pendidikan Persiswa

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013, perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 1, dijelaskan bahwa biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional satuan pendidikan agar

dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai Standar Nasional Pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Penentuan satuan biaya pendidikan per siswa didapat dengan perhitungan besar anggaran pembiayaan pendidikan yang dikeluarkan dibagi jumlah siswa. Besar anggaran pembiayaan pendidikan mencakup: biaya pengembangan guru dan tenaga kependidikan, honor non PNS Guru Tidak Tetap (GTT) dan Honor Non PNS Pegawai Tidak Tetap (PTT), Biaya Operasi Pendidikan Langsung Non Personalia yang selanjutnya disebut Belanja Barang dan Jasa, serta pengadaan peralatan penunjang pendidikan/pembelajaran yang selanjutnya disebut Belanja Modal. Komponen-komponen tersebut dalam rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) Dinas Pendidikan Kota Semarang diklasifikasikan menjadi Komponen Belanja Langsung yang meliputi Belanja Pegawai (PNS dan GTT/PTT), Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal (tidak termasuk biaya untuk investasi gedung dan tanah). Dari besaran total pengeluaran inilah yang kemudian dibagi jumlah siswa pada tiap satuan pendidikan, selanjutnya didapatkan satuan biaya pendidikan persiswa.

kegiatan pendidikan yang sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara teratur dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian rencana pengeluaran biaya pendidikan tahun 2013-2014, besaran satuan biaya pendidikan persiswa dan rata-rata skor pencapaian SNP yang lain, terlihat pada Tabel 1.

Dengan besaran satuan biaya pendidikan persiswa Rp2.666.389,35,- pertahun atau Rp 222.199,-perbulan, pencapaian SNP dengan rata-rata lebih dari 4 merupakan pencapaian yang bagus, namun sesungguhnya masih terdapat capaian (standar pembiayaan dan standar pendidik dan tenaga kependidikan) yang berada di bawah skor 4, Dengan demikian masih perlu mendapat perhatian khusus untuk peningkatan capaian skor rata-rata pada kedua standar tersebut. Bila dibandingkan dengan penyediaan dana BOS (Biaya Operasional Siswa) sebesar Rp1.000.000,- ditambah Rp660.000,- pertahun, maka penyediaan dana BOS dan pendamping tersebut telah memenuhi 62,26% dari besaran rata-rata satuan biaya pendidikan pertahun.

Bila dibandingkan dengan RAPBS tahun sebelumnya (2012-2013), besaran pengeluaran tahun 2013-2014 lebih kecil, yang membawa konsekuensi besaran satuan biaya pendidikan per

Tabel 1
Besaran Satuan Biaya Pendidikan Persiswa dan
Rata-rata Skor Capaian SNP
Tahun 2013-2014

Satuan Biaya Pendd./ Siswa/ tahun	Satuan Biaya Pendd./ Siswa/ bulan	Rata-rata Skor Capaian Standar				
		Pembia yaan	Dik & Tendik	Sar- pras	Prose s	Pen gelo laan
2.666.389,35 ± 1.056.400,26	222.199± 88.033	4,23± 0,71	4,52± 0,78	4,72± 0,32	4,88± 0,18	4,75 ± 0,25
Data Terbesar						
1.609.989,09	134.166	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Data Terkecil						
3.722.789,61	310.232	3,52	3,74	4,40	4,70	4,50

Dengan besaran pengeluaran tersebut diharapkan satuan pendidikan mampu menyelenggarakan

siswa juga lebih kecil, dengan jumlah siswa yang relatif sama. Besaran

tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2
Perbandingan Besaran Penganggaran
Biaya Pendidikan Tahun 2013-2014
dengan 2012-2013

Ukuran	Tahun	Total
Rata-rata Pengeluaran Satuan Pendidikan (per Tahun) (Rp)	2013-2014	2.626.502.197
	2012-2013	3.412.163.688
Rata-rata satuan Biaya Pendidikan per Satuan Pendidikan (per Tahun)- (Rp)	2013-2014	2.666.389,35
	2012-2013	3.267.192,26
Rata-rata satuan Biaya Pendidikan per Siswa (per Bulan)- (Rp)	2013-2014	222.199
	2012-2013	272.266

Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Berdasarkan analisis uji Friedman diperoleh hasil bahwa tidak ada perbedaan persepsi *stakeholder* (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, komite sekolah, dan ka.TU) terhadap pemenuhan standar pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan SMA di Kota Semarang. Pemenuhan standar pembiayaan untuk sampel diperoleh rata-rata dengan rentang 3,52 – 5,00. Item dengan rata-rata mendekati 3,00 adalah nomor item 2, 3, dan 11, dengan skor rata-rata berurut-turut adalah: 3,02; 3,03; dan 2,64. Item tersebut berturut-turut adalah (2) Sekolah membelanjakan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKA-S) (3,02); (3) Sekolah membayar gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain bagi guru padatahun berjalan (3,03); dan (11)

Sekolah menyediakan biaya pengadaan transport dan perjalanan dinas (2,64). Pemenuhan standar pembiayaan dinilai pada kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan. Pemenuhan standar pembiayaan akan sempurna, bila penggunaan anggaran sesuai dengan yang rencanakan.

Persepsi *stakeholder* (kepsek, wakasek, dan guru) terhadap pemenuhan standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan tidak berbeda secara signifikan ($\alpha = 5\%$). Rata-rata skor persepsi *stakeholder* ditunjukkan oleh mean 4,52 dengan standar deviasi 0,76. Perolehan skor rata-rata mendekati tiga adalah nomor item 18 (2,80) dan nomor item 19 (2,69), yaitu berturut-turut item (18) Tenaga laboratorium memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan, sekolah memiliki tenaga laboratorium minimal 2 (dua) orang, dan keduanya memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-I); (19) Tenaga laboratorium memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya, yaitu sekolah memiliki tenaga laboratorium minimal 2 (dua) orang, keduanya sesuai dengan tugasnya.

Pada analisis uji Friedman, persepsi *stakeholder* (kepsek, wakasek, dan guru), terdapat perbedaan secara signifikan dengan $\alpha = 5\%$. Berdasarkan *output* pada tabel Ranks didapatkan nilai *mean rank* wakasek di atas nilai *mean rank* kepala sekolah dan guru, sehingga pada uji selanjutnya variabel wakasek dikeluarkan dari analisis. Skor rata-rata persepsi *stakeholder* (kepsek dan guru) terhadap pemenuhan standar sarana dan prasarana adalah 4,72 dengan standar deviasi 0,32. Item dengan skor rata-rata terendah (3,85) adalah item nomor 19, yaitu “Sekolah memiliki ruang laboratorium bahasa yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.” Dengan demikian menjadi perhatian untuk peningkatan mutu pelaksanaan pembelajaran terkait dengan pemenuhan standar sarana dan

prasarana adalah perbedaan laboratorium bahasa.

Berdasarkan hasil uji Friedman, didapatkan simpulan bahwa tidak terdapat perbedaan secara signifikan persepsi *stakeholder* (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru) terhadap pemenuhan standar proses. Rata-rata skor persepsi adalah 4,87 dengan standar deviasi 0,405. Pada standar proses tidak terdapat perolehan skor pada item indikator yang kurang dari 4,00. Dengan kata lain persepsi *stakeholder* terhadap semua item indikator pemenuhan standar proses adalah baik.

Berdasar uji Friedman tidak terdapat perbedaan signifikan persepsi *stakeholder* (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru) terhadap pemenuhan standar pengelolaan. Skor rata-rata persepsi *stakeholder* adalah 4,75 dengan standar deviasi 0,62, dan tidak ada perolehan skor pada indikator pemenuhan standar pengelolaan di bawah 4. Dengan kata lain persepsi *stakeholder* terhadap pemenuhan standar pengelolaan adalah baik.

Biaya Personal Siswa

Biaya Personal siswa dalam melaksanakan pendidikan mencakup Biaya Langsung untuk pembelajaran (iuran rutin bulanan, iuran pembangunan SPI, iuran karya wisata, iuran tes, iuran kas kelas, iuran kegiatan olah raga, pembelian buku, pembelian LKS, pembelian buku tulis dan alat tulis, foto copy tugas-tugas, pembelian bahan praktik, pembelian seragam sekolah dan pakaian olah raga baju), dan biaya Tidak Langsung (transport ke sekolah, uang saku, uang makan siang, kursus/les di luar sekolah, rental, dan uang pulsa). Rata-rata besaran Biaya Personal siswa/tahun adalah Rp8.576.874,- atau Rp714.739,-/bulan dengan deviasi standar cukup besar, artinya rata-rata Biaya Personal siswa ada yang sangat rendah (Rp58.000,-) dan tertinggi (Rp2.058.917,-).

Penaksiran Parameter Rata-rata μ Interval Biaya Pendidikan dan Biaya Personal Siswa

Dengan menggunakan interval kepercayaan 95%, ditunjukkan bahwa,

- (1) Untuk penaksiran rata-rata biaya pendidikan siswa per tahun:

$$2.148.753 < \mu < 3.184.025$$

Artinya, bahwa 95% kita percaya rata-rata biaya pendidikan siswa pertahun ada dalam interval Rp.2.148.753,- s/d Rp 3.184.025,-

- (2) Untuk penaksiran rata-rata biaya pendidikansiswa perbulan:

$$179.063 < \mu < 265.335$$

Artinya, bahwa 95% kita percaya rata-rata biaya pendidikan siswa perbulan ada dalam interval Rp179.063,- s/d Rp 265.335,-

Bila dibandingkan dengan perolehan dana BOS (Rp1.000.000,-) dan dana Pendamping (Rp660.000,-), maka anggaran BOS dan Pendamping tersebut baru memenuhi 77,3% dari batas terendah penaksiran rata-rata biaya pendidikan siswa.

- (3) Untuk penaksiran rata-rata Biaya Personal siswa pertahun:

$$6.558.480 < \mu < 10.595.270$$

Artinya, bahwa 95% kita percaya rata-rata biaya personal siswa pertahun ada dalam interval Rp6.558.480,- s/d Rp10.595.270,-

- (4) Untuk penaksiran rata-rata biaya personal siswa perbulan:

$$546.540 < \mu < 882.940$$

Artinya, bahwa 95% kita percaya rata-rata biaya personal siswa pertahun ada dalam interval Rp546.540, s/d Rp882.940,-

Bila dibandingkan dengan perolehan dana BOS (Rp1.000.000,-) dan dana Pendamping (Rp660.000,-), maka anggaran BOS dan Pendamping tersebut baru memenuhi 19,10 % dari batas terendah penaksiran rata-rata biaya pendidikan dan personal siswa.

Simpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan pada hasil analisis data penelitian dapat disimpulkan bahwa:

- (1) Rata-rata besaran penganggaran biaya pendidikan SMA negeri Kota Semarang tahun 2013-2014 adalah: Rp2.626.502.197,- ,
- (2) Rata-rata besaran satuan biaya pendidikan persiswa Rp 2.666.389,- / pertahun atau Rp222.199,- perbulan.
- (3) Rata-rata besaran Biaya Personal siswa SMA di Kota Semarang adalah Rp 8.576.874,-pertahun atau Rp 714.739 perbulan
- (4) Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang perlu mendapat perhatian adalah standar pembiayaan dan standar pendidik dan tenaga kependidikan.
- (5) Penaksiran parametrik μ dengan interval kepercayaan 95% untuk biaya pendidikan siswa pertahun ada dalam interval Rp2.148.753,- s/d Rp 3.184.025,-; untuk biaya pendidikan siswa perbulan ada dalam interval Rp 179.063,- s/d Rp265.3357,-; untuk Biaya Personal siswa pertahun ada dalam interval Rp6.558.480,- s/d Rp10.595.270,-, dan untuk Biaya Personal siswa perbulan ada dalam interval Rp546.540,- s/d Rp882.940,-

Dari hasil penelitian ini direkomendasikan:

- (1) Perlu ditingkatkan besaran dana BOS agar bisa menutup kekurangan biaya operasional pendidikan setiap tahunnya. Karena saat ini dana BOS baru dapat menutup sebesar 77,3%

dari batas terendah penaksiran rata-rata biaya pendidikan siswa, atau 19,10 % dari batas terendah penaksiran rata-rata biaya pendidikan dan personal siswa. Apabila hal tersebut dapat dilaksanakan bisa menekan biaya-biaya yang harus dikeluarkan langsung oleh siswa.

- (2) Penganggaran bantuan BOS dan pendamping hendaknya berada dalam interval penaksiran rata-rata pembiayaan sesuai hasil penaksiran interval yang telah dilakukan dalam penelitian ini.
- (3) Perbaikan atau peningkatan pemenuhan standar pembiayaan hendaknya difokuskan pada peningkatan persentase dari komponen atau indikator bahwa sekolahmembelanjakan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenagakependidikan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah(RKA-S); Sekolahmembayar gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain bagi guru padatahun berjalan; dan sekolahmenyediakan biaya pengadaan transport dan perjalanan dinas.
- (4) Perbaikan atau peningkatan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan tenaga, hendaknya difokuskan pada komponen: sekolah memiliki tenaga laboratorium minimal 2 (dua) orang, dan keduanya memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-I); tenaga laboratorium memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya, yaitu sekolah memiliki tenaga laboratorium minimal 2 (dua) orang,keduanya sesuai dengan tugasnya.
- (5) Pemberian alokasi dana operasional untuk penyelenggaraan pendidikan tidak semata-mata didasarkan atas banyaknya siswa, melainkan juga harus diperhatikan alokasi besarnya biaya tetap yang harus dikeluarkan

oleh tiap-tiap sekolah/satuan pendidikan, dengan pertimbangan kondisi sekolah yang belum sama.

Surakarta:Magister Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas
Sebelas Maret.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Bappeda Kota Semarang yang telah memberikan kesempatan dan dana untuk pelaksanaan penelitian ini.

Sudjana. 2005. *Metoda Statistika*.
Bandung: Tarsito

Widjaja, S. 2004. Perumusan Indikator Kinerja Perguruan Tinggi dengan Metode *Delphi* dan *Analytical Hierarchy Process(AHP)*.*Jurnal Teknologi*.Edisi No.1 pp 52-62.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. 2007. *Akuntansi Pendidikan*. Jakarta: Erlangga.

BSNP. 2006. *Standar Biaya Pendidikan Biaya Operasional SD*. Jakarta: BSNP

Fattah, Nanang. 2007. *Analisis Kebijakan dan Pengelolaan Pendidikan Dasar*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia

_____.2008. "Pembiayaan Pendidikan: Landasan Teori dan Studi Empiris". *Jurnal Pendidikan Dasar*. Nomor: 9-April 2008.

Jakaria, Y. 2009. *Uji Coba Model (Validasi)*.Materi disampaikan dalam Pelatihan Penelitian dan Pengembangan *Research & Development* yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. Badan Penelitian dan Pengembangan. Depdiknas di Jakarta.

Nurteti. 2008. *Analisis Kebijakan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*. Blog Lilis Education and Social Issues. (Diakses tanggal 10 Maret 2014)

Prakosa, Ibnu. 2010. *Analisa Biaya Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar (Studi Kasus di Kabupaten Sragen)*.Tesis.

